

**Effect of Total Taxable Entrepreneurs (PFM), Income Per Capita, Inflation,
And Economic Growth of Revenue Service Tax Vat Office Pekanbaru**

Alex Sentami Putra

Dr. H. Amir Hasan MS, MM., Ak.

Drs. Azhari, MA., Ak.

Alexsentami@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the amount of taxable employers (PFM). This study aimed to examine the effect of the amount of taxable employers (PFM) rate and the rate of economic growth in VAT receipts Pekanbaru city. Data used in this study is a secondary data from BPS data and LTO in Pekanbaru.

The method used in this research is the study of time series for 5 years from 2008 to 2012 with monthly data units, the number of samples is 60 pieces. Hypothesis testing is performed by using linear regression analysis based on multiple hypothesis testing. result of this research indicates the amount of taxable employers, income per capita, inflation and economic growth affect the acceptance of Pekanbaru city VAT at 14.3% while the remaining 85.7% is influenced by other variables.

The results of hypothesis testing found that inflation does not have a significant impact on VAT receipts Pekanbaru = 0.664 > 0.05. Meanwhile, the amount of taxable employers (PFM), per capita income and economic growth has a significant influence on VAT receipts Pekanbaru = 0.015 < 0.05 0.007 < 0.05 0.009 < 0.05 level.

Keywords: entrepreneur taxable amount (PFM), income per capita, inflation, economic growth, the city of Pekanbaru VAT receipts

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah. Selain sebagai penerimaan utama negara (Budgetary), pajak juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur (Regulatory) dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian Wibowo (2000). Disamping kedua fungsi tersebut pajak masih mempunyai

tujuan-tujuan lain seperti redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung atau “backbone” terhadap keberlangsungan roda pemerintahan Indonesia.

Sejak tahun 1989 penerimaan pajak Indonesia terus meningkat hal ini dikarenakan adanya reformasi perpajakan yang dimulai tahun 1984. Reformasi perpajak di Indonesia ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perpajakan, antara lain UU no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU no 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

UU no 8 tahun 1983 tentang PPnBM ini turut meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, hingga akhirnya saat ini PPN menjadi penyumbang

sektor perpajakan terbesar kedua setelah PPh.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan PPN setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebesar 193.067,50 triliun meningkat menjadi 230.604,90 triliun ditahun 2010 dan naik lagi menjadi 298.441,40 triliun pada 2011, dan pada tahun 2012 menjadi 350.342,20 triliun.

Tabel 1.1

Tabel realisasi penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2009-2012

	Penerimaan Tahun (triliun rupiah)			
	2009	2010	2011	2012
PPh MIGAS	50.043,70	58.872,70	65.230,70	58.665,80
PPh NON MIGAS	267.571,30	298.172,80	366.746,30	454.168,70
PPN DAN PPnBM	193.067,50	230.604,90	298.441,40	350.342,20
PBB	24.270,20	28.580,60	29.057,80	35.646,90
BPHTB	6.464,50	8.026,40		
CUKAI	56.718,50	66.165,90	68.075,30	72.443,10
PAJAK LAINNYA	3.116,00	3.968,80	4.193,80	5.632,00
Total	601.251,70	694.392,10	831.745,30	976.898,70

Sumber: www.bps.go.id

Namun jika dilihat tabel 1.2 realisasi penerimaan PPN dibanding jenis pajak lainnya pada tahun 2011 PPN memiliki pencapaian target terendah yaitu sebesar 93,06%,

dibandingkan dengan jenis pajak lainnya seperti PPh yang memiliki pencapaian 99,8%, PBB mencapai 102,86%, cukai sebesar 108,47% dan pajak lainnya 99,83%.

Tabel 1.2

Tabel anggaran penerimaan pajak 2011

Jenis Pajak	Anggaran Penerimaan pajak 2011 (triliun rupiah)	Persentase realisasi penerimaan pajak
PPh MIGAS dan PPh NON MIGAS	420.493,78	99,8%
PPN DAN PPnBM	312.109,97	93,06%
PBB	27.682,39	102,86%
BPHTB		
CUKAI	62.759,93	108,47%
PAJAK LAINNYA	4.200,06	99,83%

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 tahun APBN 2011

Rendahnya penerimaan PPN seperti yang terlihat pada tabel diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN. Menurut data dari Direktorat Jendral Pajak Indonesia jumlah pengusaha kena pajak (PKP) di Indonesia berdasarkan data per desember 2011 yang terdaftar sebagai PKP dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak adalah sekitar 870.000 pengusaha. Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 450.000 pengusaha saja yang berstatus aktif dan secara rutin setiap bulan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN-nya. Sedangkan sisanya sebesar 420.000 kemungkinan sudah tutup atau sudah tidak aktif lagi (www.pajak.go.id).

Tingginya jumlah PKP akan berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Karena semakin banyak jumlah PKP maka akan semakin banyak pula orang pribadi atau badan yang akan menyetorkan PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak dan akan mempengaruhi besarnya tingkat penerimaan PPN.

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Di Indonesia provinsi yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan pendapatan perkapita

mencapai Rp. 101.858.000 diikuti Provinsi DKI Jakarta dengan Rp. 74.065.000 dan di posisi ketiga adalah Provinsi Riau sebesar Rp. 52.264.000, data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2008 dalam (www.wikipedia.org).

Meningkatnya pendapatan perkapita akan mendorong peningkatan terhadap daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang meningkat tentu saja akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tingkat inflasi adalah kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus (kontinu) yang menyebabkan terjadinya efek substitusi. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan konsumen mengurangi pembelian terhadap barang-barang yang harganya relatif mahal dan beralih ke barang substitusinya dengan harga yang relatif murah. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat dan berujung pada menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena PPN merupakan pajak atas konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat akan memberikan kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi barang dan jasa kena pajak di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh jumlah PKP, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menguji pengaruh jumlah (PKP), Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN di kota pekanbaru.

II KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Dasar Perpajakan

Pengertian tentang pajak telah banyak diungkapkan oleh para ahli, namun masing masing memiliki tujuan yang sama. Menurut Tjahjono dan Husein (2000): “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut Rochmat soemitro: “iuran rakyat kepada kas negara (prihal kekayaan dari sektor partikel ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan

tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Kemudian menurut Waluyo dan Iliyas (2000): “iuran kepada negara yang (yang dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut perauran-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pertamakalinya diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Simens seorang industrialis dan konsultan pemerintah jerman pada tahun 1919. Namun ironisnya justru pemerintah Prancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam sistem perpajakannya pada tahun 1954, sedangkan Jerman baru menerapkannya pada awal tahun 1968. Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 april 1985 menggantikan pajak penjualan atau PPN yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.

PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung karena menempatkan kedudukan pemikul beban pajak, penanggung jawab pajak dan penanggung pajak secara terpisah. Pajak langsung adalah pajak yang menempatkan ketiga unsur tersebut pada seseorang atau badan dan tidak memisahkannya.

2.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 di disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja atau pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Wujud pendapatan negara (*Government Revenue*) berupa uang (*Cash*) sebagai penerimaan negara, yang menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Saat ini penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 penerimaan negara dari sektor pajak menyumbang 73,57% dari total penerimaan negara.

Sejak tahun 1989 penerimaan pajak Indonesia terus meningkat, hal ini dikarenakan adanya reformasi perpajakan yang dimulai tahun 1984. Reformasi perpajak di Indonesia ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perpajakan, antara lain UU no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU no 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Dengan adanya UU no 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia ikut juga meningkat setiap tahunnya, hingga akhirnya pada saat ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang sektor perpajakan terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Pada tahun 2012 PPN menyumbang 36,2% dari total penerimaan pajak dalam negeri.

2.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPN adalah salah satu bentuk pajak tidak langsung karena tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak yang artinya ada pihak lain yang bertugas untuk memungutnya dan menyetorkan kepada kas negara (PKP). Banyaknya jumlah PKP akan berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Semakin banyak jumlah PKP makan akan semakin banyak pula yang akan menyetorkan PPN dan akan mempengaruhi besarnya tingkat penerimaan PPN.

2.5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu parameter untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi konsumsi masyarakat, semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat akan semakin tinggi pula konsumsi barang dan jasa di masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa pada akhirnya meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.6 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap

terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi dijadikan sampel (sensus). Karena penelitian yang dilakukan berupa *studi time series* selama 5 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dengan unit data bulanan maka jumlah sampel adalah 60 buah.

3.2 Jenis Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang diambil dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari data skunder (*secondary data*) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Kantor pelayanan Pajak (KPP) Senaplan, Kantor pelayanan Pajak (KPP) Tampan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat jumlah PKP, mencatat penerimaan PPN kota pekanbaru yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Kantor pelayanan Pajak (KPP) Senaplan, Kantor pelayanan Pajak (KPP) Tampan, sedangkan data mengenai inflasi, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi didapat dari Bank Indonesia dan kantor BPS Propinsi Riau.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Penerimaan PPN kota Pekanbaru dihitung dari jumlah penerimaan PPN di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Kantor pelayanan Pajak (KPP) Senaplan, Kantor pelayanan Pajak (KPP) Tampan yang diambil per bulan dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

3.4.2 Variabel Independent

3.4.2.1 Jumlah pengusaha kena pajak (PKP)

Jumlah pengusahaan kena pajak (PKP) adalah total PKP yang telah membayarkan PPN dikantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Kantor pelayanan Pajak (KPP) Senaplan, Kantor pelayanan Pajak (KPP) Tampan yang diambil per bulan dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

3.4.2.2 Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata yang diterima penduduk, pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur krmakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Variabel ini diukur berdasarkan pendapatan perkapita penduduk kota Pekanbaru yang diambil per bulan dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

3.4.2.3 Tingkat inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrisik) mata uang suatu negara Tajul Khalwaty (2000) dalam Saepulloh (2012). Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) per bulan dari tahun 2008 sampai tahun 2012.

3.4.2.4 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Variabel ini diukur berdasarkan PDRB per bulan dari tahun tahun 2008 sampai tahun 2012.

3.5 Teknik Analisi Data

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan teknik analisis regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis) versi 16. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh pengaruh jumlah PKP, pendapatan perkapita, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat penerimaan PPN dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \beta_0 + \beta_1 \text{PKP} + \beta_2 \text{INF} + \beta_3 \text{ERC} + \beta_4 \text{YKap} + \mu$$

Dimana:

PPN = Penerimaan PPN (Milyar Rupiah)

PKP = Jumlah Pengusaha Kena Pajak (unit)

INF = Inflasi(%)

ERC = Pertumbuhan Ekonomi (%)

YKap= Pendapatan Per Kapita (dalam rupiah)

β_0 = intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

μ = error term

Penelitian ini telah melalui serangkaian uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah terdistribusi dengan normal dan bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Analisis statistika yang dilakukan dalam bab ini adalah

analisis regresi linear berganda. Adapun analisis tersebut digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yang berkaitan dengan pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita, Tingkat Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru.

Berikut adalah data total penerimaan PPN pertahun dari tahun 2008 – tahun 2012 dan jumlah PKP dari tahun 2008 – tahun 2012 yang akan diolah menggunakan SPSS versi 20

Tabel 4.1
Total penerimaan PPN dan Jumlah PKP
2008-2012

Tahun	Total Penerimaan PPN (Rp)	Persentase kenaikan (%)	Jumlah PKP	Persentase kenaikan (%)
2008	1.004.443.715.733	-	21731	-
2009	1.174.727.024.071	16,95299654	24308	11,85863513
2010	1.137.357.835.574	-3,1810955	26284	8,129011025
2011	1.057.918.329.936	-6,984565732	29714	13,04976412
2012	1.242.382.034.464	17,43647873	34821	17,18718449

4.1.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami data, dimulai dari

jumlah data (N), nilai tertinggi (*Maximum*), nilai terendah (*Minimum*), nilai rata-rata (*Mean*), dan standar penyimpangan data (*Standar Deviasi*). Data yang didapat tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS versi 20.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKP	60	1586	3176	2281	403,926616
Ykap	60	2159602	4619752	3337128	682854,307
INF	60	0.02	2.46	.597833333	.54439234
ERC	60	8.79	10.91	9.386	.66398693
PPN	60	61103172443	150802117712	93613815663	20561377253
Valid N (listwise)	60				

4.1.2 Hasil Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya pola distribusi data Ghozali (2011). Dalam melakukan pengujian normalitas digunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Normalnya sebuah variabel dilihat dari *Asymp Sig (2-tailed) > alpha*

0,05. Pengujian hipotesis baru dapat dilakukan setelah seluruh variabel berdistribusi normal maka harus dinormalkan terlebih dahulu. Untuk memenuhi uji normalitas data maka data-data yang *outlier* diganti dengan nilai rata-rata. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

No	Variabel	Nilai <i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	Alpha	Keterangan
1	Tingkat penerimaan PPN	0,370	0,05	Normal
2	Jumlah PKP	0,182	0,05	Normal
3	Pendapatan Perkapita	0,355	0,05	Normal
4	Inflasi	0,075	0,05	Normal
5	Pertumbuhan ekonomi	0,623	0,05	Normal

Sumber: Data Skunder yang Diolah, 2014

Dari tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan berdasarkan nilai *Asymp. Sig* masing-masing variabel penelitian yang terdiri dari penghentian prematur atas prosedur audit, tekanan waktu, tindakan supervisi, materialitas, pengalaman audit, prosedur *review* dan kontrol kualitas sudah berada diatas 0,05. Artinya setiap variabel sudah berdistribusi normal.

4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu hasil analisis regresi tersebut diuji apakah telah memenuhi asumsi klasik yang mendasari analisis regresi. Tiga macam uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji model tersebut yaitu: uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

4.1.3.1 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel independen dalam persamaan regresi linear berganda mempunyai korelasi yang erat satu sama lainnya. Parameter yang dapat ditengarai dari multikolinearitas adalah biasanya regresi mempunyai persamaan dengan nilai R² yang tinggi, F hitung tinggi, dan banyak variabel independen yang tidak signifikan. Penelitian yang mengandung multikolinearitas akan berpengaruh terhadap hasil penelitian tersebut menjadi tidak berfungsi.

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan mendasarkan pada nilai tolerance dan VIF. Nilai tolerance untuk semua variabel independen lebih besar dari 0,10. *Rule of thumb* yang digunakan untuk menentukan bahwa nilai tolerance tidak berbahaya terhadap gejala multikolinearitas adalah 0,10. dari nilai VIF diketahui bahwa VIF

semua variabel kurang dari 10. menurut Guarati (1995) semakin tinggi nilai VIF maka semakin tinggi Kolinearitas antar variabel

independen. *Rule of thumb* yang digunakan untuk menentukan bahwa nilai VIF tidak berbahaya adalah kurang dari 10.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PKP	0.892	1.122	Tidak terjadi Multikolinearitas
Ykap	0.882	1.134	Tidak terjadi Multikolinearitas
INF	0.948	1.054	Tidak terjadi Multikolinearitas
ERC	0.929	1.076	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data Olahan SPSS 20

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.4 terlihat bahwa pada kolom *collinearity statistics*. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk PKP sebesar 1.122, YKap sebesar 1.134, INF sebesar 1.054, dan ERC sebesar 1.076. Nilai VIF untuk seluruh variabel independen lebih kecil daripada 10 ($VIF < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa ke empat variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan memenuhi persyaratan asumsi tentang multikolinearitas.

4.1.3.2 Hasil Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu

dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson.

- a) Bila nilainya < -2 : autokorelasi positif
- b) Bila nilainya diantara -2 sampai 2 : tidak ada korelasi
- c) Bila nilainya > 2 : autokorelasi negative

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya hasil uji Durbin Watson berada diantara - 2 dan 2 yang artinya tidak terjadi autokorelasi

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summary^p

Model	Durbin-Watson	Keterangan
1	1.827	Tidak Terjadi Autokorelasi

a. Predictors: (Constant), PKP, YKap, INF, ERC

b. Dependent Variable: PPN

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini adalah

1.827 yang berada diantara -2 dan 2 yang artinya tidak terjadi autokorelasi..

4.1.3.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

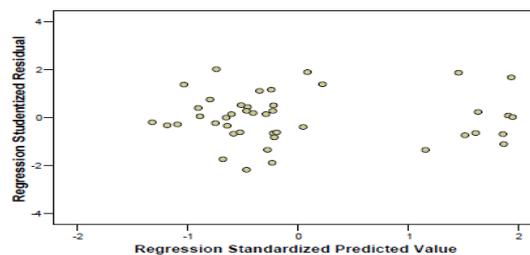
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah

diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$). Jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas sedangkan jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2011).

Gambar 4.1 menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Scaterplot

Dependent Variable : PPN



4.1.4 Hasil Regresi Berganda

Bagian ini memberikan gambaran model regresi yang digunakan, dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu PKP, YKap, INF, ERC.

Dalam melakukan analisis regresi ini dilakukan dengan metode

enter. Dengan menggunakan metode *enter* semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Gambaran umum hasil analisis dengan metode *enter* dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.257	.259		4.850	.000
PKP	.001	.006	.317	2.948	.015
Ykap	.010	.006	.285	2.688	.007
INF	-.020	.000	-.066	-.438	.664
ERC	.001	.008	.019	2.127	.009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda

$$PPN = 1,257 + 0,001 PKP + 0,010 YKap - 0,020 INF + 0,001 ERC$$

Adapun arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1,257. Artinya adalah apabila PKP, Ykap, INF, dan ERC diasumsikan nol (0), maka Penerimaan PPN bernilai 1,257.
2. Nilai koefisien regresi variabel PKP sebesar 0,001. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan PKP sebesar 1 % maka akan meningkatkan Penerimaan PPN sebesar 0,001% dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel YKap sebesar 0,010. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan YKap sebesar 1 % maka akan meningkatkan Penerimaan PPN sebesar 0,010 % dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel INF sebesar 0,020. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan INF sebesar 1 % maka akan menurunkan Penerimaan PPN sebesar 0,020 % dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Nilai koefisien regresi variabel ERC sebesar 0,001. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan ERC sebesar 1 % maka akan meningkatkan Penerimaan PPN sebesar 0,001 % dengan asumsi variabel lain tetap.

4.1.5 Hasil Pengujian Koefisiensi Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur presentase tingkat kekuatan prediksi dari pengujian yang dilakukan. Semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Berikut adalah hasil olah data untuk uji koefisien determinasi:

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Koefisiensi Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.390 ^a	.152	.143		.333

Sumber : Data Olahan SPSS 20

Dari Tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa nilai nilai *Adjusted*

R Square sebesar 0,143, Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh

variabel independen (PKP, YKap, IMF, dan ERC) terhadap variabel dependen (PPN) adalah sebesar 14,3 %, sedangkan sisanya sebesar 85,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hipotesis

Hasil perhitungan analisis regresi guna menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan, dapat dilihat pada tabel 4.8 tampak bahwa variabel Jumlah PKP, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan

terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan nilai signifikan t dari variabel Jumlah PKP, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,015, 0,007, dan 0,009 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,050. Sedangkan variabel Inflasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan nilai signifikan t dari variabel Inflasi sebesar 0,664 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,050.

Tabel 4.8
Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.257	.259		4.850	.000
PKP	.001	.006	.317	2.948	.015
Ykap	.010	.006	.285	2.688	.007
INF	-.020	.000	-.066	-.438	.664
ERC	.001	.008	.019	2.127	.009

4.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8, dari tabel tersebut dapat dilihat nilai $t_{hitung} 2,948 > t_{tabel} 2,004$, $t_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 55)$ dan signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Ini berarti bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Ini membuktikan bahwa semakin tinggi Jumlah Pengusaha Kena Pajak

maka akan semakin tinggi Penerimaan PPN atau sebaliknya, semakin rendah Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka Penerimaan PPN akan semakin rendah pula di Pekanbaru tahun 2012. Kondisi ini terjadi karena semakin banyak jumlah PKP maka akan semakin banyak pula orang pribadi atau badan yang akan menyetorkan PPN kepada Direktorat Jendral Pajak.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Penerimaan PPN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel 4.8, dari tabel tersebut dapat dilihat nilai $t_{hitung} 2,668 > t_{tabel} 2,004$ ($\alpha = 0,05$ dan $df = 55$) dan signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Ini berarti bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Ini membuktikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Perkapita maka akan semakin tinggi Penerimaan PPN atau sebaliknya, semakin rendah Pendapatan Perkapita maka Penerimaan PPN akan semakin rendah pula di Pekanbaru tahun 2012. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kena pajak.

4.2.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Penerimaan PPN.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8, dari tabel tersebut dapat dilihat nilai $t_{hitung} -0,438 > t_{tabel} 2,004$, ($\alpha = 0,05$ dan $df = 55$) dan signifikansi sebesar 0,664 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Ini berarti bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Kondisi ini terjadi karena inflasi di kota Pekanbaru masih digolongkan ringan sehingga tidak mengganggu perekonomian yang menyebabkan minat membeli masyarakat menjadi menurun. Masyarakat tetap mengkonsimasi barang dan jasa kena pajak seperti biasa sehingga inflasi tidak mempengaruhi penerimaan PPN kota Pekanbaru.

4.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Penerimaan PPN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan PPN kota Pekanbaru. Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8, dari tabel tersebut dapat dilihat nilai $t_{hitung} 2,127 < t_{tabel} 2,004$, ($\alpha = 0,05$ dan $df = 55$) dan signifikansi sebesar 0,009 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Ini berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Ini membuktikan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka akan semakin tinggi Penerimaan PPN atau sebaliknya, semakin rendah Pertumbuhan Ekonomi maka tingkat Penerimaan PPN akan semakin rendah pula di Pekanbaru tahun 2012. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi barang dan jasa kena pajak di masyarakat.

V Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris Pengaruh jumlah pengusaha kena pajak (PKP), pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN kantor pelayanan pajak Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun berturut-turut, sedari 2008 hingga 2012 dan mencakup 60 sampel. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi penerimaan PPN adalah jumlah pengusaha kena pajak (PKP), pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel

tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN.

2. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.
3. Besarnya pengaruh jumlah pengusaha kena pajak (PKP), pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN adalah 14,3% sisanya sebanyak 85,7% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang apabila diatasi mungkin dapat memperbaiki hasil penelitian selanjutnya. Berikut ini keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh jumlah pengusaha kena pajak (PKP), pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor lain yang mungkin mempengaruhi penerimaan PPN yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.
2. Periode penelitian yang singkat selama lima tahun (2008-2012) yang mungkin menyebabkan hasil dapat berpengaruh jika periode penelitian lebih lama.
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya terpusat pada kota Pekanbaru, tidak mengikut sertakan seluruh kota dan provinsi yang ada di Indonesia.

5.3 Saran

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya,

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya agar dalam melakukan penelitian yang sejenis, peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan PPN seperti suku bunga Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang disetorkan
2. Menambah masa periode penelitian hingga 6 sampai 7 tahun agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih akurat dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.
3. Menambah luas lokasi penelitian tidak terbatas dikota pekanbaru jika bisa dilakukan Se-Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari dan Purbayu Budi Santosa, 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta: Andy Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Ekonomi*, Berbagai Tahun Penerbitan.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Tahunan*, Berbagai Tahun Penerbitan.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ilyas, B. Wirawan & Waluyo (2000), *Perpajakan Indonesia*, ed. Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Intan P E F. 2009. *Pengaruh With Holding System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kpp*